



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN EVALUASI

PILKADA SERENTAK

KPU Provinsi
Kalimantan Timur

20 24



www.kaltim.kpu.go.id



[kpu_kaltim](https://www.instagram.com/kpu_kaltim)



[KPU Provinsi Kaltim](https://www.facebook.com/KPUProvinsiKaltim)



[@kpukaltim_ofc](https://twitter.com/kpukaltim_ofc)



[KPU Provinsi Kalimantan Timur](https://www.youtube.com/KPUProvinsiKalimantanTimur)

PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Laporan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat selesai disusun. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan bertujuan untuk menyajikan informasi proses tahapan, program, kegiatan dan hasil penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Kalimantan Timur, serta sebagai dokumentasi kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Diharapkan dengan adanya Laporan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi kita semua serta menjadi kegiatan yang mendukung tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk kedepannya.

Tentunya kami sadar masih ada banyak hal yang perlu disempurnakan dalam Laporan ini sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami perlukan agar kami dapat terus melakukan perbaikan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat semakin baik dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum dikemudian hari.

Samarinda, 28 April 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur,



★ Fahmi Idris

SAMBUTAN

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang turut membantu mensukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kami sampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. DPRD Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
4. Kodam VI/Mulawarman
5. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Timur
8. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
9. Korem 091/Aji Suryanata Kusuma
10. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur
11. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur;
12. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur;
13. Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur
14. Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur
15. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
18. Komisi Informasi Kalimantan Timur
19. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur;
20. Kepala Bagian di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
21. Kepala Sub Bagian di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
22. Seluruh staf pelaksana KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR ISI

COVER	i
PENGANTAR.....	ii
SAMBUTAN	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. TUJUAN	4
D. MANFAAT	5
BAB II	7
DESAIN EVALUASI	7
A. KRITERIA EVALUASI	7
B. PRINSIP EVALUASI	9
C. METODE EVALUASI	10
BAB III	11
HASIL EVALUASI	11
A. EVALUASI TAHAPAN DAN NON-TAHAPAN	11
B. EVALUASI KELEMBAGAAN	33
C. EVALUASI EKTERNALITAS	48
BAB IV.....	52
SIMPULAN DAN SARAN	52
A. SIMPULAN.....	52
B. SARAN.....	52
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54

DAFTAR TABEL

Table 1 KPU Provinsi/KPU Kab/Kota menyusun anggaran sesuai kebutuhan.....	11
Table 2 dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu.....	12
Table 3 petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan.....	12
Table 4 Rencana Kerja disusun sesuai Kebijakan.....	13
Table 5 rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan	13
Table 6 Jumlah Pasangan Calon	14
Table 7 Jumlah Pasangan Calon	14
Table 8 fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan	16
Table 9 Pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU.....	16
Table 10 Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian	16
Table 11 batas waktu rilis SK	17
Table 12 Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan.....	17
Table 13 jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan	18
Table 14 jumlah Pelanggaran pidana/TUN	18
Table 15 jumlah Kecamatan yang tidak melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan	18
Table 16 jumlah Kab/Kota yang tidak melaksanakan Rekapitulasi tingkat Kab/Kota	19
Table 17 jumlah pelanggaran administrasi/pidana/TUN	19
Table 18 PSU dan PUUS	20
Table 19 tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu	20
Table 20 Tahapan Penetapan Hasil sesuai Jadwal	21
Table 21 jumlah pelanggaran administrasi/pidana/TUN	21
Table 22 petunjuk teknis Penyelesaian Sengketa Hukum	22
Table 23 proses penyelesaian perkara hukum	23
Table 24 kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit.....	24
Table 25 penetapan DPT	24

Table 26 kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS	25
Table 27 Pantarlih yang menggunakan ecoklit.....	25
Table 28 PKPU 7/2024	25
Table 29 SK KPU 799/2024.....	26
Table 30 ecoklit.....	26
Table 31 Sidalih	26
Table 32 Bimtek Ecoklit dan Sidalih	27
Table 33 Sirekap Pilkada.....	27
Table 34 Bimtek Sirekap Pilkada.....	27
Table 35 petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama	28
Table 36 ruang lingkup kerja sama	28
Table 37 evaluasi pelaksanaan kerja sama	28
Table 38 ketersediaan jaringan internet	29
Table 39 ketersediaan jaringan internet	29
Table 40 template website.....	29
Table 41 pemasangan alat monitoring	29
Table 42 Regulasi Logistik Pilkada.....	30
Table 43 dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada.....	30
Table 44 kebutuhan logistik Pilkada	30
Table 45 spesifikasi logistik Pilkada	30
Table 46 alokasi anggaran	30
Table 47 anggaran HIBAH Pilkada.....	31
Table 48 pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik.....	31
Table 49 pengamanan selama produksi logistik Pilkada	31
Table 50 pengetahuan terkait pengaman produksi surat suara	31
Table 51 jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada.....	31
Table 52 waktu mitigasi resiko dalam produksi.....	32
Table 53 dokumen kerjasama	32
Table 54 dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik.....	32
Table 55 dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik.....	33
Table 56 dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada.....	33

Table 57 pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi.....	33
Table 58 Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan.....	33
Table 59 dokumen laporan	33
Table 60 petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih	34
Table 61 kegiatan sosialisasi.....	34
Table 62 kegiatan sosialisasi.....	34
Table 63 kegiatan sosialisasi.....	34
Table 64 segmentasi pemilih pemula	35
Table 65 segmentasi pemilih perempuan.....	35
Table 66 segmentasi pemilih disabilitas	35
Table 67 kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih.....	35
Table 68 pendidikan pemilih	36
Table 69 tingkat partisipasi pemilih	36
Table 70 kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih.....	36
Table 71 tingkat kesadaran pemilih.....	36
Table 72 kegiatan pendidikan pemilih	36
Table 73 faktor penghambat.....	37
Table 74 kegiatan sosialisasi.....	37
Table 75 social media officer	37
Table 76 merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos	37
Table 77 anggota PPS yang pernah menjadi Badan Adhoc.....	38
Table 78 penyaluran anggaran untuk badan adhoc.....	38
Table 79 anggaran yang disalurkan	39
Table 80 laporan pertanggungjawaban keuangan	39
Table 81 laporan pertanggungjawaban	39
Table 82 format laporan pertanggungjawaban keuangan.....	39
Table 83 aplikasi SITAB	39
Table 84 aplikasi SITAB	40
Table 85 pelaksanaan Bimtek	40
Table 86 bimbingan teknis kepada badan adhoc.....	40
Table 87 pertanggungjawaban anggaran hibah.....	40
Table 88 Laporan Keuangan	40
Table 89 PIPK.....	41

Table 90 penatausahaan persediaan Pemilihan	41
Table 91 temuan pemeriksaan auditor internal	41
Table 92 pemusnahan persediaan Pemilihan	41
Table 93 pemusnahan persediaan Pemilihan	41
Table 94 penghapusan persediaan Pemilihan	42
Table 95 wasdal.....	42
Table 96 pengendalian pengelolaan aset.....	42
Table 97 SDM pengelola persediaan Pemilihan	42
Table 98 penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi	42
Table 99 Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP.....	43
Table 100 PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi	43
Table 101 Admin RUP	43
Table 102 akun belanja sesuai dengan bukti pertanggungjawaban	43
Table 103 kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ	44
Table 104 Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC.....	44
Table 105 Modul KPPS	44
Table 106 Modul PPK dan PPS.....	44
Table 107 Modul PPK dan PPS.....	45
Table 108 modul	45
Table 109 isu - isu strategis.....	45
Table 110 E- Jam Pelajar	45
Table 111 Pakta Integritas.....	45
Table 112 kepemimpinan yang kondusif.....	45
Table 113 rumusan tujuan pengelolaan kegiatan	46
Table 114 rumusan tujuan kegiatan Satker	46
Table 115 identifikasi risiko.....	46
Table 116 mekanisme analisis risiko.....	46
Table 117 rewiu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan	46
Table 118 strategi pembinaan SDM	47
Table 119 em pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN.....	47
Table 120 memanfaatkan sarana komunikasi.....	47
Table 121 SPI	47
Table 122 pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker	48

Table 123 tindak lanjut terhadap hasil evaluasi	48
Table 124 validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada	48
Table 125 pengawasan produksi.....	48
Table 126 pengawasan produksi.....	48
Table 127 standarisasi kualitas surat suara	48
Table 128 monitoring proses pengiriman logistik	49
Table 129 hambatan atau gangguan Pengiriman logistik	49
Table 130 hambatan atau gangguan Pengiriman logistik	49
Table 131 hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik.....	49
Table 132 logistik	49
Table 133 dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik.....	50
Table 134 standar tempat penyimpanan/gudang Logistik.....	50
Table 135 peran Pemerintah Daerah	50
Table 136 sortir dan hitung	50
Table 137 standar pemeliharaan	50
Table 138 Berita Acara Pemusnahan Surat Suara	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas dan berwenang melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Evaluasi secara umum diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi Pilkada Serentak itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengidentifikasi keberhasilan

dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU Provinsi menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan tersebut. Evaluasi merujuk kepada pendapat William Dun (2014:2) adalah *Policy analysis is a process of multidisciplinary inquiry aiming at the mation. As a problem-solving discipline, it draws on social science methods, theories, and substantive findings to solve practical problems.* Evaluasi melibatkan serangkaian kegiatan untuk melakukan penaksiran (*appraisal*), memberi skor (*rating*), dan menilai (*assessment*), segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan.

Dalam kerangka tersebut, evaluasi pilkada serentak tahun 2024 ini mencakup penyelenggaraan tahapan, non-tahapan, kelembagaan penyelenggara pemilihan (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan. Adapun ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc.

Penyelenggaraan evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survey, dimana kuesioner survey diisi oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Data yang diperoleh dari survey ini akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan potret penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.

Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap

kebijakan (mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

C. TUJUAN

Disamping memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, dimana dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 dan bertujuan untuk menyajikan informasi proses tahapan, program, kegiatan dan hasil penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur, serta sebagai dokumentasi kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Secara umum tujuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020; Hayat, 2019).
2. Mengetahui dampak dari kebijakan. Dengan evaluasi maka akan terlihat pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat sehingga dapat memperbaiki keadaan masyarakat (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020; Mergoni & De Witte, 2022).
3. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan instrumen kontrol terhadap kebijakan atau program yang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang

diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020).

4. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang (Akbar & Mohi, 2018; Mergoni & De Witte, 2022).
5. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati (Halimah, 2020; Hayat, 2019).

Evaluasi Pemilihan Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini secara khusus memiliki tujuan untuk:

1. Menilai penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024: baik dari aspek tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan;
2. Membangun model dan standar evaluasi Pemilihan Serentak: yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

D. MANFAAT

Menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya.

Menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU Provinsi untuk melakukan evaluasi pemilihan di masa mendatang. Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi pemilihan serentak tahun 2024 ini juga membawa beberapa manfaat yang secara umum

berguna untuk penguatan organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah:

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau masukan kepada pimpinan lembaga terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan pelanggan (Halimah, 2020).
2. Evaluasi pemilihan serentak tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.
3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi ISO). Sertifikasi ISO ini menjadi bagian dari arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kinerja organisasi pemerintah dalam menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu lembaga (Al Hudib & Cousins, 2022).
4. Evaluasi pemilihan serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU di seluruh tingkatan.
5. Hasil evaluasi pemilihan serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU. Sebagaimana dinyatakan oleh Posavac & Carey, evaluasi dapat menyediakan tanggapan balik terhadap pelayanan sosial yang telah diberikan oleh sebuah lembaga (Halimah, 2020).
6. Hasil evaluasi pemilihan serentak ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi triger untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan manajemen pemilihan, misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara pemilihan adhoc, penggunaan sistem IT dalam pemilihan, dan lain-lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi pemilihan serentak.

BAB II

DESAIN EVALUASI

A. KRITERIA EVALUASI

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekwensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau

ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;

4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Evaluasi pemilu ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:

1. Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengan tujuan pemilu.
2. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan public/

B. PRINSIP EVALUASI

Evaluasi pemilihan Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut..

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU Provinsi dengan penyediaan bukti-bukti administratif (*Self assessment combined with evidence based evaluation*).
2. Prinsip Comprehensiveness yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).

BAB III
HASIL EVALUASI

Penyelenggaraan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpusat (focus group discussion) dengan melibatkan pihak eksternal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hasil analisa tersebut akan disajikan di dalam Bab III ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas dimensi tahapan dan non-tahapan dan dimensi kelembagaan.

A. EVALUASI TAHAPAN DAN NON-TAHAPAN

• **Evaluasi Tahapan**

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan KPU kepada seluruh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pertanyaan mencakup indikator tahapan pemilihan dan sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan pemilihan. Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh satker (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) dapat digambarkan data sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan dan Organisasi

a. Persentase anggaran (RKAK/L dan DIPA) sesuai dengan kebutuhan Pemilih

Apakah KPU Provinsi/KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 1 KPU Provinsi/KPU Kab/Kota menyusun anggaran sesuai kebutuhan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan bahwa KPU Provinsi/KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan.

Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 2 dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan bahwa dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu.

Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 3 petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan sebagaimana diatur sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 543 tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan; dan
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 4 Rencana Kerja disusun sesuai Kebijakan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan bahwa rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

- b. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan? Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaiannya?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 5 rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan.

Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?

Revisi anggaran di KPU Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali.

2. Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

- a. *Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 6 Jumlah Pasangan Calon

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden memiliki pasangan calon, terdapat 6 pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan.

- b. *Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 7 Jumlah Pasangan Calon

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden memiliki pasangan calon, terdapat 6 pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi.

- c. *Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi factual?*

Terdapat 4 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi factual.

- d. *Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik?*

Terdapat 27 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

- e. *Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan?*

Terdapat 29 Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan.

- f. *Berapa jumlah pelanggaran administrasi/ Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada?*

Tidak terdapat pelanggaran administrasi/ Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada.

- g. *Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?*

Terdapat 3 sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada.

3. Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye

- a. *Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 8 fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan.

- b. *Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 9 Psangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden yang memiliki pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU.

- c. *Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 10 Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian.

- d. *Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon?*

Debat Publik untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.

- e. Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 11 batas waktu rilis SK

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan bahwa batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri.

- f. Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?

Dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian.

- g. Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 12 Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan bahwa Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya.

- h. Berapa jumlah pelanggaran administrasi/pidana/TUN yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada?

Tidak terdapat pelanggaran administrasi/pidana/TUN yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada.

4. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

- a. *Berapa jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	10	100,0	100,0
	Ada	0	0	0	0
	Total	10	10	100,0	

Table 13 jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa seluruh TPS melaksanakan tahapan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- b. *Berapa jumlah Pelanggaran pidana/TUN yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	10	100,0	100,0
	Ada	0	0	0	0
	Total	10	10	100,0	

Table 14 jumlah Pelanggaran pidana/TUN

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa tidak terdapat Pelanggaran pidana/TUN yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

- c. *Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan??*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	10	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	10	100,0	

Table 15 jumlah Kecamatan yang tidak melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa seluruh Kecamatan melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan.

- d. *Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub?*

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	10	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	10	100,0	

Table 16 jumlah Kab/Kota yang tidak melaksanakan Rekapitulasi tingkat Kab/Kota

- e. *Berapa jumlah pelanggaran administrasi/pidana/TUN yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	10	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	10	100,0	

Table 17 jumlah pelanggaran administrasi/pidana/TUN

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa tidak terdapat pelanggaran administrasi/pidana/TUN yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada.

- f. *Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?*

Terdapat 6 TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu.

- g. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	10	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	10	100,0	

Table 18 PSU dan PUUS

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa tidak terdapat TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK.

- h. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 19 tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa tidak terdapat kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu.

- i. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan dan/atau rekapitulasi ulang suara sebagai tindak lanjut Putusan MK?

Tidak terdapat kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan dan/atau rekapitulasi ulang suara sebagai tindak lanjut Putusan MK.

5. Tahapan Hasil Pemilihan

- a. apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 20 Tahapan Penetapan Hasil sesuai Jadwal

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

- b. *Berapa jumlah pelanggaran administrasi/pidana/TUN yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 21 jumlah pelanggaran administrasi/pidana/TUN

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa tidak terdapat pelanggaran administrasi/pidana/TUN yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada.

6. Tahapan Pemberian Advokasi Hukum dan Penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan (di Bawaslu, PTUN, DKPP, PN, KIP, MA dan MK) serta pelayanan pertimbangan

- a. *Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?*

Terdapat 6 perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota.

- b. *Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?*

Perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota ada di 3 (tiga) Lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- c. *Berapa persentase (%) dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota?*

70%-90% dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.

- d. *Ada berapa Perkara Perselisian Hasil Pemilihan 2024 di MK yang dihadapi?*

Terdapat 6 Perkara Perselisian Hasil Pemilihan 2024 di MK yang dihadapi.

- e. *Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan?*

70%-90% dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan.

- f. *Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti?*

Terdapat 2 Putusan MK yang harus ditindaklanjuti dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

- g. *Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud? Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud?*

Tindak lanjut hasil putusan perkara hukum tersebut dilaksanakan sebagaimana putusan terlampir dan tidak terdapat kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud.

- h. *Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 22 petunjuk teknis Penyelesaian Sengketa Hukum

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum. Dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum

- i. *Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 23 proses penyelesaian perkara hukum

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa *dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan.*

7. Tahapan Pembentukan Badan Adhoc

- a. *Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan?*

Terdapat 3948 (tiga ribu Sembilan ratus empat puluh delapan) Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan.

- b. *Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?*

Terdapat 441 (empat ratus empat puluh satu) Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan.

- c. *Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya?*

Terdapat 2104 (dua ribu seratus empat) Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya.

- d. *Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?*

Terdapat 1 (satu) PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan

- e. *Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?*

Terdapat 6 (enam) PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu.

- f. *Berapa Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat?*

Tidak terdapat PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat.

8. Tahapan Data dan Informasi

- a. Instrumen Proses Penyusunan Daftar Pemilih

Berapa persen kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Sesuai	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 24 kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa 100% kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih.

Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 25 penetapan DPT

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa tidak terdapat factor yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Instrumen Tugas Pantarlih

Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 26 kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa 100% kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk.

Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 27 Pantarlih yang menggunakan ecoklit

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa 100% Pantarlih menggunakan ecoklit.

c. Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih

Apakah PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 28 PKPU 7/2024

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai.

Apakah SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 29 SK KPU 799/2024

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai.

d. Instrumen Penggunaan Ecoklit dan Sidalih

Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 30 ecoklit

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa penggunaan ecoklit sudah sesuai.

Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 31 Sidalih

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa penggunaan Sidalih sudah sesuai.

Apakah Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 32 Bimtek Ecoklit dan Sidalih

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai.

e. Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada

Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 33 Sirekap Pilkada

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai.

Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 34 Bimtek Sirekap Pilkada

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai.

- Evaluasi Non-Tahapan

1. Tahapan Perencanaan dan Organisasi

- a. Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 35 petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama

- b. Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 36 ruang lingkup kerja sama

- c. Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 37 evaluasi pelaksanaan kerja sama

- d. Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?

Pada KPU Provinsi Kalimantan Timur terdapat 8 dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada

2. Tahapan Data dan Informasi

- a. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0

	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 38 ketersediaan jaringan internet

b. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK? PPS? KPPS?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 39 ketersediaan jaringan internet

c. Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota??

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 40 template website

d. Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 41 pemasangan alat monitoring

3. Tahapan Perencanaan Logistik Pilkada

a. Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0

	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 42 Regulasi Logistik Pilkada

- b. Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 43 dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada

- c. Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 44 kebutuhan logistik Pilkada

- d. Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 45 spesifikasi logistik Pilkada

- e. Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 46 alokasi anggaran

- f. Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 47 anggaran HIBAH Pilkada

- g. Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 48 pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik

4. Tahapan Instrumen Produksi Logistik Pilkada

- a. Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 49 pengamanan selama produksi logistik Pilkada

- b. Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengaman produksi surat suara?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 50 pengetahuan terkait pengaman produksi surat suara

- c. Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 51 jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada

- d. *Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 52 waktu mitigasi resiko dalam produksi

5. Tahapan Instrumen Pendistribusian Logistik Pilkada

- a. *Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 53 dokumen kerjasama

- b. *Siapa saja stakholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada?*

TNI dan Polri yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada.

- c. *Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 54 dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik

- d. *Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 55 dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik

e. Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 56 dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada

f. Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 57 pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi

B. EVALUASI KELEMBAGAAN

1. Perencanaan dan Organisasi

a. Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 58 Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan

b. Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 59 dokumen laporan

2. Partisipasi Hubungan Masyarakat

- a. Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pilkada 2024 mudah dipahami?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 60 petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih

- b. Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 61 kegiatan sosialisasi

- c. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 62 kegiatan sosialisasi

- d. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaanya tidak memenuhi target yang ditetapkan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 63 kegiatan sosialisasi

- e. Apa dasar yang anda gunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih?

Dasar yang di gunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih pada KPU Provinsi Kalimantan Timur Arahkan Pimpinan.

- f. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 64 segmentasi pemilih pemula

- g. *Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 65 segmentasi pemilih perempuan

- h. *Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 66 segmentasi pemilih disabilitas

- i. *Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 67 kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih

- j. *Apa dasar pertimbangan yang anda pergunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih?*

Kebutuhan Faktual di Lapangan menjadi dasar pertimbangan yang anda pergunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih.

- k. *Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 - 20	0	0	0	0
	21 - 40	0	0	0	0
	41 - 60	0	0	0	0
	61 - 80	10	100,0	100,0	100,0
	81 - 100	0	0	0	0

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 68 pendidikan pemilih

- l. Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 69 tingkat partisipasi pemilih

- m. Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	50,0	50,0	50,0
	Ya	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 70 kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih

- n. Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	6	60,0	60,0	60,0
	Ya	4	40,0	40,0	40,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 71 tingkat kesadaran pemilih

- o. Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	10	100,0	100,0	100,0
	81% - 100%	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 72 kegiatan pendidikan pemilih

- p. Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 73 faktor penghambat

- q. Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 74 kegiatan sosialisasi

- r. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (social media officer)?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 75 social media officer

- s. Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 76 merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos

- t. KPU menggandeng stakeholder untuk membantu menyosialisasikan informasi pilkada. Apa jenis dukungan yang diberikan?
videotron, digital info di jalan tol, radio dan lain-lain.
- u. Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja?

KPU bersama LSM, NGO dan Ormas yang berjumlah 27 lembaga melakukan 37 kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 dengan mengundang 100 orang peserta yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Lembaga

tersebut antara lain HMI, PHDI, PMII, JPPR, KIPP, PMKRI, Permabudhi, PGI, JRKI, KIPP, Koalisi Pemuda Muda, Pemuda Pemilu, AIPI, Warga Muda, PBNU, PPUAD, Hikmahbudhi, KMHDI, NETFID dan Aisyiyah.

v. *Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana saja?*

Dilihat dari dukungan yang diberikan oleh 6 Kementerian/Lembaga dan 22 BUMN/BUMD serta kegiatan bersama 27 LSM, NGO dan Ormas, besaran ruang lingkup dan detail daerah yang melaksanakana belum dapat diukur, namun secara garis besar dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat di atas 80%.

w. *Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?*

Manfaat bagi masyarakat yang mendapatkan dampak sosialisasi antara lain budaya politik masyarakat yang aktif, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memilih, melahirkan potensi pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, serta memberikan petunjuk tentang tata cara dan tahapan dalam Pilkada 2024.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	3	30,0	30,0	30,0
	61% - 80%	4	40,0	40,0	40,0
	81% - 100%	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 77 anggota PPS yang pernah menjadi Badan Adhoc

3. Keuangan

a. *Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 78 penyaluran anggaran untuk badan adhoc

b. *Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc?*

	Frequency	Percent	Valid	Cumulative
--	-----------	---------	-------	------------

				Percent	Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 79 anggaran yang disalurkan

- c. Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	9	90	90	90,0
	Ya	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 80 laporan pertanggungjawaban keuangan

- d. Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 81 laporan pertanggungjawaban

- e. Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 82 format laporan pertanggungjawaban keuangan

- f. Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 83 aplikasi SITAB

- g. Apakah sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 84 aplikasi SITAB

- h. Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 85 pelaksanaan Bimtek

- i. Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 - 20	0	0	0	0
	81 - 100	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 86 bimbingan teknis kepada badan adhoc

- j. Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	2	20,0	20,0	20,0
	21% - 40%	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 87 pertanggungjawaban anggaran hibah

- k. Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Sistem Pengendalian Intren yang memadai?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 88 Laporan Keuangan

- I. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 89 PIPK

4. PBJ dan BMN

- a. Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 90 penatausahaan persediaan Pemilihan

- b. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 91 temuan pemeriksaan auditor internal

- c. Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 92 pemusnahan persediaan Pemilihan

- d. Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 93 pemusnahan persediaan Pemilihan

- e. Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 94 penghapusan persediaan Pemilihan

- f. Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 95 wasdal

- g. Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 96 pengendalian pengelolaan aset

- h. Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 97 SDM pengelola persediaan Pemilihan

- i. Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 98 penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi

- j. Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 99 Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP

- k. Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 100 PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi

- l. Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 101 Admin RUP

- m. Apakah akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 102 akun belanja sesuai dengan bukti pertanggungjawaban

5. Sumber Daya Manusia

- a. Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0

	Ya	90	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 103 kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ

b. Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ?

26 (dua puluh enam) ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ.

c. Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 104 Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC

d. Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?

525 (lima ratus dua puluh lima) PPK dan 3.114 (tiga ribu serratus empat belas) PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek.

e. Apakah ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 105 Modul KPPS

f. Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 106 Modul PPK dan PPS

g. Apakah ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 107 Modul PPK dan PPS

- h. Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 108 modul

- i. Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 109 isu - isu strategis

- j. Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 110 E- Jam Pelajar

6. Sistem Pengendalian Intern

- a. Apakah seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 111 Pakta Integritas

- b. Apakah pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 112 kepemimpinan yang kondusif

- c. Apakah rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 113 rumusan tujuan pengelolaan kegiatan

- d. Apakah rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 114 rumusan tujuan kegiatan Satker

- e. Apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 115 identifikasi risiko

- f. Apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 116 mekanisme analisis risiko

- g. Apakah Satker telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 117 reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan

- h. Apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan

SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang pemilihan dan kesekretariatan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 118 strategi pembinaan SDM

- i. apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan)?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 119 em pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN

- j. Apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 120 memanfaatkan sarana komunikasi

- k. Apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 121 SPI

- l. Apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 122 pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker

m. Apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 123 tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

C. EVALUASI EKTERNALITAS

a. Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 124 validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada

b. Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 125 pengawasan produksi

c. Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 126 pengawasan produksi

d. Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 127 standarisasi kualitas surat suara

- e. Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 128 monitoring proses pengiriman logistik

- f. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 129 hambatan atau gangguan Pengiriman logistik

- g. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 130 hambatan atau gangguan Pengiriman logistik

- h. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 131 hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik

- i. Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 132 logistik

- j. Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ada	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 133 dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik

- k. Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 134 standar tempat penyimpanan/gudang Logistik

- l. Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ada	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 135 peran Pemerintah Daerah

- m. Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 136 sortir dan hitung

- n. Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 137 standar pemeliharaan

o. Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 138 Berita Acara Pemusnahan Surat Suara

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

- **Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan :**
Secara umum, tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, termasuk pendaftaran pemilih, pembentukan Pantarlih, verifikasi partai politik, dan pencalonan. Semua pihak terkait telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- **Evaluasi Non-Tahapan:**
Tidak ada pelanggaran serius yang ditemukan dalam pelaksanaan tahapan. Penyelenggaraan dukungan fasilitasi seperti koordinasi antar lembaga juga berjalan lancar. Namun, beberapa kendala terkait sumber daya manusia dan logistik diidentifikasi di beberapa daerah terpencil.
- **Kendala Utama:**
Terdapat kendala dalam perekrutan Pantarlih, terutama di daerah-daerah terpencil, karena kurangnya peminat akibat faktor geografis dan kurang memadainya standar honor.

B. SARAN

- **Peningkatan Standar Gaji Pantarlih:** Untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi Pantarlih, perlu adanya penyesuaian honorarium yang lebih kompetitif, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
- **Perbaikan Sistem Logistik:** Pengiriman logistik harus lebih dimonitor, terutama di daerah terpencil yang mengalami kendala koordinasi dan distribusi. Penyediaan gudang penyimpanan yang lebih baik juga disarankan.
- **Penggunaan Teknologi:** Aplikasi seperti e-coklit dan Sipol sudah membantu dalam verifikasi dan pendaftaran pemilih, namun penggunaannya dapat lebih diperluas dengan sosialisasi yang lebih intensif agar lebih banyak digunakan oleh petugas di lapangan.

- **Pelatihan dan Rekrutmen:** Diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi petugas pemilu di daerah terpencil, terutama terkait penggunaan teknologi dan pengelolaan logistik.
- **Kolaborasi dengan Stakeholder:** Koordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya sudah baik, namun harus dipastikan terus berjalan secara efektif sepanjang pemilu.